

POLITISASI AGAMA DI ERA DIGITAL DAN PENANGANANNYA

Prof. Dr. H. Noor Achmad, M.A

Aanggota DPR RI

Abstrak

Artikel ini membahas tentang fenomena digital diplomacy di Indonesia dan tantangannya. Pada era masyarakat terkoneksi internet, informasi menambah pengaruh lebih kuat, karena informasi itu dapat menyebar dalam hitungan detik atau menit. Pemerintah, khususnya lembaga yang mengurus masalah kebijakan luar negeri, seharusnya mengambil manfaat dari keadaan ini karena mereka akan mampu memperluas agenda diplomasi publik mereka dalam cara yang bahkan lebih interaktif. Diplomasi digital, yang juga disebut e-diplomasi, mengacu pada penggunaan teknologi komunikasi internet dan informasi yang luas untuk membantu aktor dalam diplomasi publik, akses informasi, dan analisis data. Meskipun setiap aktor yang terlibat dalam politik global dapat melakukannya, namun dalam kasus ini, ini terutama mengacu pada diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan menonjolnya gagasan kewarganegaraan digital (digital citizenship), diplomasi tidak hanya berjalan pada satu arah seperti dulu dan negara harus menyesuaikan diri. Penulis menelusuri fenomena ini melalui webnya kemlu RI dan dokumentasi yang sesuai dengan data yang dibutuhkan.

Kata Kunci: digital diplomacy, kebijakan luar negeri, diplomasi publik

Artikel ini menjelaskan tentang bahaya jika agama dipahami, disyiarkan dan dipolitisasi oleh kelompok kepentingan di era milenial yang didominasi oleh digitalisasi. Terungkapnya sindikat penebar kebencian, hoax, dan adu domba yang mempropagandakan sikap dan pandangan permusuhan antar agama dan antar suku adalah manifest dari perselingkuhan antara kegagalan memahami ajaran agama yang rahmatan lil alamin dan kelompok kepentingan kekuasaan. Keduanya mencerminkan orientasi fundamentalisme agama dan politik. The invisible hand tersebut tidak mengehendaki temali dan tenun religious dan nasionalis terjalin dengan baik, indah, dan kuat sebagai penobang eksistensi Indonesia yang religius. The invisible hand itu bisa saja bermotif penguasaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah, atau juga kepentingan ideology agama dan politik sebagai eksese persaingan geopolitik di tingkat global.

Kata kunci: politisasi Agama, era digital, fundamentalisme agama

1. PENDAHULUAN

Era digital telah menandakan terjadinya perubahan fundamental dan radikal di hampir seluruh aspek kehidupan. Perubahan itu sering disebut dengan disrupsi. Disrupsi yang cukup memprihatinkan terjadi juga pada sektor pemahaman agama. Sehingga menimbulkan gap dan miss of paradigm di antara sesama kelompok. Ada yang sudah siap menghadapinya, namun lebih banyak yang belum siap menyongsongnya. Disrupsi pada belajar agama terjadi saat generasi lama memelajari agama dengan metode yang bisa dipastikan otoritatif, yaitu langsung bertemu dengan guru pengajar. Guru pengajar agama tersebut juga produk dari system pendidikan dan pengajaran agama yang jejaring keilmuannya (sanad) bisa dipertanggungjawabkan karena bersambung kepada guru, kyai, ulama, ajengan, yang tidak terputus hingga kepada Rasulullah Saw.

Di era disrupsi ini, system sanad keilmuan itu telah bergeser. Generasi baru (milenial) memperoleh ilmu agama sudah tidak lagi kepada guru pengajar yang otoritatif. Generasi milenial belajar agama cenderung memilih cara instan dan praktis. Hal tersebut

didukung oleh ketersediaan perangkat belajar berbasis digital. Situs serta tools yang memfasilitasi belajar agama semakin mudah dijumpai di media online dan media sosial.

Yang paling siap menghadapi era disrupsi tersebut adalah mereka yang berintelektual bijak, baik dari kalangan usia dewasa maupun pemuda. Problemanya adalah kepada kelompok yang belum atau tidak siap yang rata-rata ada pada masyarakat yang tingkat pendidikan rendah dan instan, khususnya bidang pendidikan agama. Segmen ini didominasi oleh kelompok pekerja perkantoran, buruh, dan kelompok pelajar eksakta. Selain tidak siap, segmen ini juga dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan (*interest group*) yang menghendaki meraih kepentingannya dengan segala cara bahkan dengan cara-cara yang destruktif sekalipun. Kelompok kepentingan ini berorientasi kepada kekuasaan politik dan ideology.

Apa bahayanya jika agama dipahami, disyiarkan dan dipolitisasi oleh kelompok kepentingan di era milenial yang didominasi oleh digitalisasi ini?

2. PEMBAHASAN

2.1. Islam adalah Cinta Kasih

Jika ayat dalam Al-Qur'an yang berjumlah 6666 diambil intisarinya, maka ada dalam surah Al-Fatihah yang berjumlah tujuh ayat. Jika surah Al-Fatihah diambil intinya, maka ada dalam ayat pertama, yaitu *Basmalah*. Jika ayat *Basmalah* itu diambil intinya, maka ada pada redaksi *Ar-Rahman* dan *Ar-Rahim*. Dan ternyata, akar kata dari kedua redaksi tersebut berasal dari satu kata, yaitu *rahima*, yang berarti welas asih atau cinta. Jadi, pesan inti dari ajaran Islam adalah cinta dan welas asih.

Hal tersebut sangat jelas dapat diperhatikan, misalnya dalam gerakan shalat. Di akhir gerakannya, shalat ditutup dengan ucapan salam. Ini adalah pesan Islam, bahwa umat muslim wajib hukumnya menebarkan salam, yang berarti keselamatan dan kedamaian. Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw, "*Tebarkanlah kedamaian di antara kalian*" (Al-Hadis).

Dalam hadis lainnya, Rasulullah Saw juga telah dengan begitu terangnya menyampaikan indicator keabsahan perilaku muslim, yaitu:

"Orang Muslim adalah jika muslim lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya" (Al-Hadis)

Lebih tegas lagi jika melihat pesan Al-Qur'an tentang larangan untuk menyakiti sesama saudaranya sendiri dengan perumpamaan memakan daging tubuh sendiri,

بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَ رَجِيمًا أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَحِيهِ مَيْتًا فَكَرَهُنَّ مُؤَهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Hujurat [49]: 12)

2.2. Politik dan Agama di Era Milenial

Dale Canon membuat klasifikasi ekspresi beragama ke dalam enam bentuk (Dale Canon: *Six Ways Being Religion*: 2003). *Pertama*, ritus. *Kedua*, rasional. *Ketiga*, asketik.

Keempat, supranatural. *Kelima*, sufistik. *Keenam*, praksis. Keenam cara manusia beragama tersebut merupakan gambaran ekspresi sekaligus kualitas seseorang dalam beragama.

Dari klasifikasi tersebut, tingkat pemahaman masyarakat yang terpaku pada level ritus semata dan belum mampu memahami pesan inti agama yang termaktub dalam sufisme apalagi rasional, menjadi salah satu factor menguatnya fundamentalisme agama. Tekstualisme beragama berpotensi menisbikan dan menafikan aspek moral dan rasional beragama. Inilah yang sedang menjangkiti kelompok-kelompok revivalis yang justru sangat merebak di kalangan yang baru mengenal Islam (muallaf) namun memiliki semangat dakwah islamiyah yang militan.

Ciri umum segmen militant-muallaf itu dominan berada pada segmen usia milenial, baik kategori usia milenial kualitatif maupun kuantitatif, berbasis pendidikan eksak (non santri), dan “abangan”. Jadi, milenial di sini tidak terjebak pada usia kuantitatif semata, tetapi juga secara kualitatif. Artinya, baik pemuda usia 13 – 20 tahun maupun pekerja kantoran yang belajar agama secara instan melalui media digital dan media sosial, bisa dikategorikan sebagai segmen milenial. Sedangkan segmen “abangan” disinyalir terjebak pada jargon-jargon dan symbol-simbol bela agama sebagai bentuk psikologi kompensasionalis mereka. Kesadaran tentang jauhnya perilaku mereka dari nilai-nilai luhur agama dikompensasikan dan dikonversikan kepada politik bela agama yang dimainkan oleh kelompok politik tertentu. Di titik inilah pertemuan antara pemahaman agama yang fundamental bertemu dengan kepentingan kelompok politik.

Segmen kelompok militant muallaf tersebut sangat mudah untuk terpancing oleh symbol-simbol agama yang dikomoditaskan oleh kelompok kepentingan yang berorientasi kekuasaan dikarenakan modal sosial yang terfasilitasi dalam era digital. Sebagaimana hasil riset menyebutkan, bahwa pengguna media sosial didominasi oleh usia muda dan dunia bisnis. (Mata Air Fondation dan Alvara Research Center: 2017)

2.3. Jejak Digital Agama di Tahun Pesta Politik

Realita politik di tahun pesta politik 2018 dan 2019 ini semakin dinamis – untuk tidak mengatakan memanas-. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini dalam menyongsong tahun pesta politik baik di tingkat Pileg, Pilkada, maupun Pilpres adalah menguatnya politisasi agama. Sesungguhnya Islam sendiri tidak tabu terhadap politik. Dalam Islam, politik terkadang dijadikan sebagai sebuah instrument utama untuk memastikan ajaran dan hikmah Islam berjalan dan sampai kepada tujuannya dengan cara-cara yang beradab. Hal ini terekam pada zaman keemasan kepemimpinan Rasulullah Saw, Khulafa Rasyidun, dan beberapa era keemasan khalifah dan sultan di abad pertengahan. Di sinilah sinyalemen dari Imam Al-Ghazali menemukan relevansinya, bahwa agama dan kekuasaan ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw,

“Dua golongan manusia jika keduanya harmonis, maka kehidupan masyarakat juga harmoni. Namun jika keduanya disharmoni, maka masyarakat juga penuh kemafsadatan. Kedua golongan tersebut adalah ulama dan umara.” (Al-Hadis)

Di abad pertengahan semua pihak mengakui dunia Islam sebagai dunia *trend setter* di bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan sains. Karya-karya masterpiece dan monumental terlahir di dalamnya. Tokoh-tokoh intelektual muslim menjadi Bapak Ilmu Pengetahuan bagi perkembangan sains Barat di era Renaissance.

Namun, ada pula moment dimana Islam hanya dijadikan alat kepentingan politik yang hanya berorientasi kepada kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. di era

modern ini adalah maraknya penggunaan media sosial yang isinya penuh dengan hoax, fitnah, mengumbar keburukan sesama muslim.

Terungkapnya sindikat penyebar kebencian, hoax, dan adu domba yang mempropagandakan sikap dan pandangan permusuhan antar agama dan antar suku adalah manifest dari perselingkuhan antara kegagalan memahami ajaran agama yang rahmatan lil alamin dan kelompok kepentingan kekuasaan. Keduanya mencerminkan orientasi fundamentalisme agama dan politik.

Indicator Fundamentalisme agama dan politik dengan sangat gamblang dapat dilihat dari hal berikut;

Pertama, maraknya ekstrimisme agama yang gemar mengkapling surga dan neraka hanya dengan doktrin khilafah. Padahal, Islam sangat fleksibel dalam tata manajemen pemerintahan. System pemerintahan apa saja dipersilahkan dalam Islam asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam Al-Qur'an serta Sunnah dan prinsip-prinsip musyawarah mufakat.

Kedua, maraknya penistaan agama. Indonesia adalah negara yang religious. Seluruh denyut nadi kehidupan berbangsa dan bernegara selalu dialiri oleh nafas religious. Oleh karenanya, sangatlah mudah menggunakan isu-isu agama untuk kepentingan sebaliknya, yaitu merusak sendi kehidupan berbangsa. Jika ingin merusak bangsa, unsur sentiment agama sangat efektif untuk dibajak dan dinodai.

Kedua factor tersebut sebenarnya bukan pemicu utama, melainkan hanya medium yang digunakan oleh actor-aktor *the invisible hand* untuk merusak tenun kerukunan antara elemen agamis dan nasionalis. The invisible hand tersebut tidak mengehendaki temali dan tenun religious dan nasionalis terjalin dengan baik, indah, dan kuat sebagai penobang eksistensi Indonesia yang religius. The invisible hand itu bisa saja bermotif penguasaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah, atau juga kepentingan ideology agama dan politik sebagai akses persaingan geopolitik di tingkat global.

3. KESIMPULAN

3.1. Solusi

Sebagai upaya penguatan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara di tengah disrupsi era digital ini, maka setidaknya ada beberapa langkah strategis yang penting untuk diperhatikan.

Pertama, saingi sebaran hate speech dengan sebaran peace speech. Memblokir situs negative mudah saja dilakukan oleh pemerintah. Namun, tidak akan menjamin berhentinya atau matinya situs tersebut. Justru akan semakin banyak muncul situs-situs atau portal berita negative sejenis. Apalagi disusul dengan munculnya tuduhan kriminalisasi informasi oleh pemerintah. Oleh karenanya, yang lebih tepat adalah banjiri ruang media dengan kontra narasi, yaitu peace speech. Berita-berita yang berorientasi tentang pentingnya persatuan, kerukunan, persaudaraan, dan skala prioritas pembangunan bangsa sangat penting untuk dibanjirkan di ruang media massa.

Kedua, re-edukasi Islam Rahmah, utamanya ke kalangan low educated. Sebagai penerima informasi, segmen low educated adalah massa mengambang yang penting untuk terus diberdayakan agar semakin sadar tentang mana konten hoax dan mana konten fakta.

Ketiga, program literasi digital sejak usia dini. Hal ini penting agar teknologi digital benar-benar dikelola oleh sumber daya manusia yang kapabel dan kredibel. Jangan sampai kreativitas digital justru dikuasai oleh manusia penyebar kebencian, fitnah, dan adu domba.

Keempat, penegakan hukum secara tegas kepada siapa saja baik produsen, penyebar, atau propaganda konten agama yang bermuatan hoax, hate speech, makar, dan fitnah.

Wallahu a'lamu bi ash-shawab.

Semarang, 28 Agustus 2018.